

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Pendekatan Secara Yuridis Normatif.....	10
2. Tipe Penelitian	10
3. Jenis Data.....	10
4. Metode Analisis Bahan Hukum	12
F. Definisi Operasional	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II.....	20
TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PENYIARAN.....	20
A. Pengertian Komunikasi Massa, Penyiaran, dan Hukum Penyiaran	20
1. Pengertian Komunikasi Massa.....	20

2.	Penyiaran.....	23
3.	Hukum Penyiaran.....	24
B.	Sejarah Media, Hukum Media di Indonesia dan Media Penyiaran.....	26
1.	Sejarah Media Massa	26
2.	Sejarah Hukum Media Massa di Indonesia.....	28
3.	Sejarah Media Penyiaran	30
C.	Karakteristik Media Penyiaran.....	31
D.	Televisi sebagai Media Penyiaran.....	33
1.	Pengertian Televisi.....	33
2.	Sejarah Televisi.....	38
E.	Ruang Lingkup Izin Penyiaran Televisi Berlangganan	39
1.	Pengertian Televisi Kabel (<i>Cable Television</i>).....	39
2.	Sejarah Televisi Kabel (<i>TV Cable</i>).....	40
3.	Perkembangan Televisi Kabel (<i>TV Cable</i>) di Indonesia	40
4.	Manfaat dan Dampak Kehadiran Televisi Kabel (<i>TV Cable</i>).....	42
5.	Istilah-Istilah pada Televisi Kabel (<i>TV Cable</i>).....	43
F.	Macam-Macam Lembaga Penyiaran dalam Hukum Penyiaran	45
G.	Aspek Hukum Perizinan dalam Penyiaran.....	51
1.	Mekanisme Perizinan dalam Penyiaran	51
2.	Tata Cara Perizinan	55
H.	Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.....	58
BAB III		61
TINJAUAN KHUSUS TENTANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM ADMINISTRATIF DALAM PENYIARAN.....		61
A.	Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	61
1.	Pengertian Hukum Pidana.....	61
2.	Pengertian Tindak Pidana	71
B.	Hukum Pidana dalam Penyiaran	76
C.	Pengertian Hukum Administrasi Negara	83
1.	Istilah Hukum Administrasi Negara	83

D. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara.....	89
E. Ketentuan Administratif dalam Hukum Penyiaran	94
BAB IV	100
ANALISIS HUKUM PELANGGARAN PIDANA ATAS IZIN PENYIARAN TELEVISI BERLANGGANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN.....	
A. Kasus Posisi	99
1. Para Pihak	99
2. Kronologis Perkara	100
3. Dakwaan	103
4. Tuntutan	104
5. Upaya Hukum	109
B. Analisis Hukum Lembaga Penyiaran Yang Melakukan Pelanggaran Perizinan Yang Tidak Diperpanjang Namun Tetap Melakukan Penyebarluasan Siaran Berdasarkan Analisis Putusan Perkara Nomor 129/PID.B/2015/PT.PBR.....	112
C. Akibat Hukum Bagi Lembaga Penyiaran Yang Melanggar Ketentuan Perizinan Yang Tidak Diperpanjang Setelah Adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap	134
BAB V	149
PENUTUP	149
A. Kesimpulan	149
B. Saran	154
DAFTAR PUSTAKA	157
Lampiran.....	161